



INTISARI

Kebijakan pemerintah dalam bidang konsumsi pangan yaitu mengembangkan diversifikasi pangan dengan menggali sumber-sumber/pangan lokal. Untuk mewujudkan diversifikasi pangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal yang ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal. Di tingkat Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pati menindaklanjuti peraturan tersebut dengan menyusun Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan diversifikasi konsumsi pangan lokal di Kabupaten Pati, dan melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih dan dianggap dapat mewakili dan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan diversifikasi konsumsi pangan lokal di Kabupaten Pati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan diversifikasi konsumsi pangan lokal di Kabupaten Pati tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut antara lain : (1) Komunikasi : Penyampaian isi kebijakan/sosialisasi kepada para pelaksana kebijakan tidak dilakukan dengan baik; (2) Sumber Daya : Dukungan sumber daya manusia yang kurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Instansi yang terlibat hanya 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) instansi pelaksana; (3) Struktur Organisasi : Penyusunan SOP terlambat sehingga tidak efektif mendukung pelaksanaan kebijakan; dan (4) Sikap masyarakat terhadap pangan lokal : Masyarakat menganggap bahwa makanan lokal adalah makanan yang “*kuno dan ndeso*” dan lebih cenderung ke pangan lainnya seperti roti dan *western food* yang dianggap modern.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Diversifikasi konsumsi, Pangan Lokal



ABSTRACT

The government policy in food consumption sector is to develop food diversification by exploring the local source/food. Government created instrument to achieve food diversification, such as Regulation of President No. 22,2009 about Local Resources based Accelerating Food Consumption Diversification Policy, which further regulated by ministry of Agriculture based on Regulation of Minister of Agriculture No.43, 2009 about the action. The regulations followed by Pati Regent by issued Regulation of Regent No. 28, 2010 about Local Resources based Accelerating Food Consumption Diversification Policy.

Research aims to know the implementation of local food consumption diversification policy in Pati regency, and analyze the factors that affect the implementation of local food consumption diversification policy in Pati regency. This study is a qualitative, where data was taken from a number of informants who were selected and deemed to represent and involved directly with the implementation of local food diversification.

Result showed that the implementation of local food consumption diversification policy in Pati Regency was failed. The factors that influence the implementation of these policy include : (1) Communication : Submission of policy content / dissemination to the policy implementers is not done well; (2) Resources: Support of human resources that is less in terms of both quantity and quality. Agencies involved only 7 (seven) of 11 (eleven) implementing agencies; (3) Organizational Structure: SOP was created late so did not effectively support the implementation of policies; and (4) The attitude of the community towards local food: People assume that local food is food that is "out of date and rustic" and more inclined to other food such as bread and western food that are considered modern.

Keywords : Policy implementation, Consumption Diversification, Local food